

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 6, NO. 2, DESEMBER 2015

ISSN: 2086-6313

PENGARUH VARIABEL-VARIABEL FUNDAMENTAL MAKROEKONOMI, NONEKONOMI, DAN NEWS (BERITA) TERHADAP PERGERAKAN NILAI TUKAR RUPIAH PERIODE 2004-2014

Rasbin

KAJIAN EVALUASI DAMPAK PENGHAPUSAN KEBIJAKAN "HOLD HARMLESS" DALAM ALOKASI DAU: PENDEKATAN MODEL SYSTEM DYNAMICS

Joko Tri Haryanto dan Budhi Purwandaya

AGLOMERASI, PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI, DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JAKARTA

Ariesy Tri Mauleny

ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN LOMBOK UTARA (STUDI KASUS PERENCANAAN PARTISIPATIF TAHUN 2009-2013)

Masjudin Ashari, Wahyunadi, dan Hailudin

EVALUASI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN MENGGUNAKAN METODE RAPPOVERTY

Nafiah Ariyani, Akhmad Fauzi, Bambang Juanda, dan Irfan Syauqi Beik

KENDALA DAN UPAYA PENGEMBANGAN INDUSTRI BATIK DI SURAKARTA MENUJU STANDARDISASI

Achmad Sani Alhusain

PENGENDALIAN NEGARA ATAS BUMN SEKTOR TELEKOMUNIKASI PASCAPRIVATISASI

Sahat Aditua F. S.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 6, NO. 2, DESEMBER 2015

ISSN: 2086-6313

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v-vi
Abstrak	vii-xiv
PENGARUH VARIABEL-VARIABEL FUNDAMENTAL MAKROEKONOMI, NONEKONOMI, DAN NEWS (BERITA) TERHADAP PERGERAKAN NILAI TUKAR RUPIAH PERIODE 2004-2014	
<i>Rasbin</i>	123-134
KAJIAN EVALUASI DAMPAK PENGHAPUSAN KEBIJAKAN "HOLD HARMLESS" DALAM ALOKASI DAU: PENDEKATAN MODEL SYSTEM DYNAMICS	
<i>Joko Tri Haryanto dan Budhi Purwandaya</i>	135-145
AGLOMERASI, PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI, DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JAKARTA	
<i>Ariesy Tri Mauleny</i>	147-162
ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN LOMBOK UTARA (STUDI KASUS PERENCANAAN PARTISIPATIF TAHUN 2009-2013)	
<i>Masjudin Ashari, Wahyunadi, dan Hailudin</i>	163-180
EVALUASI POGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN MENGGUNAKAN METODE RAPPOVERTY	
<i>Nafiah Ariyani, Akhmad Fauzi, Bambang Juanda, dan Irfan Syauqi Beik</i>	181-197
KENDALA DAN UPAYA PENGEMBANGAN INDUSTRI BATIK DI SURAKARTA MENUJU STANDARDISASI	
<i>Achmad Sani Alhusain</i>	199-213
PENGENDALIAN NEGARA ATAS BUMN SEKTOR TELEKOMUNIKASI PASCAPRIVATISASI	
<i>Sahat Aditua F. S.</i>	215-226

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN

KATA PENGANTAR

Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik kembali hadir di hadapan pembaca budiman dengan tujuh tulisan yang membahas hasil penelitian dan kajian terhadap persoalan ekonomi dan kebijakan publik. Pada edisi kali ini, JEKP menerima tulisan dari berbagai sumber, baik dari peneliti P3DI Setjen DPR RI, IPB, Universitas Mataram, dan Kementerian Keuangan. Ketujuh tulisan tersebut membahas persoalan kebijakan moneter, kebijakan fiskal, pembangunan perkotaan dan daerah, isu kemiskinan, perkembangan sektor industri, serta kinerja BUMN. Beragamnya lembaga asal penulis tentunya memberikan kontribusi yang besar bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ekonomi dan kebijakan publik.

Tulisan pertama berjudul “Pengaruh Variabel-Variabel Fundamental Makroekonomi, Nonekonomi, dan *News* (Berita) terhadap Pergerakan Nilai Tukar Rupiah Periode 2004-2014” yang ditulis oleh Rasbin. Tulisan ini menganalisis pengaruh variabel-variabel fundamental makroekonomi, nonekonomi, dan *news* terhadap pergerakan nilai tukar rupiah per dolar AS. Penulis menggunakan metode *Threshold Autoregressive Conditional Heteroscedasticity* (TARCH) untuk menganalisis data pergerakan nilai tukar bulanan dari Januari 2004 hingga November 2014. Hasil estimasi menunjukkan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada tahun 2004-2014 dipengaruhi secara signifikan oleh variabel-variabel fundamental makroekonomi (nilai tukar periode sebelumnya dan perbedaan tingkat suku bunga bank sentral dalam negeri dan luar negeri), nonekonomi (waktu pelaksanaan pemilu), dan *news* (*news* tentang pertumbuhan jumlah uang beredar dan tingkat harga).

Tulisan kedua ditulis oleh Joko Tri Haryanto dan Budhi Purwandaya yang berjudul “Kajian Evaluasi Dampak Penghapusan Kebijakan “*Hold Harmless*” dalam Alokasi DAU: Pendekatan Model *System Dynamics*”. Penulis berusaha menganalisis pelaksanaan kebijakan DAU, khususnya terkait dengan dampak penghapusan *hold harmless*. Dengan menggunakan metode *system dynamics*, tulisan ini menyimpulkan bahwa penghapusan *hold harmless* memberikan kinerja pemerataan fiskal yang lebih baik. Namun kriteria pemilihan atau penetapan penyeteraan fiskal antardaerah perlu dibuat lebih obyektif sesuai dengan tujuan awal alokasi DAU, yaitu untuk menghindari kesalahan dalam menilai persepsi ekuitas antardaerah. Penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa dengan mempertimbangkan pemerataan fiskal yang lebih baik, pelaksanaan penghapusan kebijakan *hold harmless* perlu dipertahankan. Penghapusan kebijakan tersebut juga memberikan pembelajaran bagi semua pemangku kepentingan untuk lebih berpikiran berskala nasional (tidak hanya peduli dengan daerah masing-masing), dan berupaya untuk meningkatkan kemandirian daerah, terutama daerah dengan kapasitas fiskal yang berpotensi tinggi.

Tulisan ketiga berjudul “Aglomerasi, Perubahan Sosial Ekonomi, dan Kebijakan Pembangunan Jakarta” ditulis oleh Ariesy Tri Mauleny. Penulis menganalisis perkembangan dan keterkaitan antara aglomerasi, pertumbuhan, dan perubahan sosial ekonomi yang terjadi di daerah Jakarta. Pendekatan yang digunakan adalah metode estimasi regresi data panel *fixed effect* yang mencakup data kota/kabupaten administrasi di Jakarta tahun 2008-2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aglomerasi produksi berpengaruh nyata dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan dan IPM. Sementara aglomerasi penduduk berpengaruh nyata dan negatif bagi pertumbuhan dan tingkat kemiskinan, serta berpengaruh positif terhadap IPM. Kota/kabupaten yang memiliki tanda *fixed effect cross* positif terhadap perkembangan sosial ekonomi adalah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat, sementara Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu menunjukkan tanda negatif.

Tulisan keempat yang ditulis oleh Masjudin Ashari, Wahyunadi, dan Hailudin dengan judul “Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Lombok Utara (Studi Kasus Perencanaan Partisipatif Tahun 2009-2013)”. Mereka menganalisis proses perencanaan partisipatif dan perkembangannya dalam penyerapan partisipasi masyarakat pada penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Kabupaten Lombok Utara Tahun pada tahun 2009-2013. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penetapan subjek bersifat *purposive sampling*, di mana informan dipilih berdasarkan tingkat keterlibatan dan penguasaannya dengan masalah dan tujuan penelitian. Data dikumpulkan melalui (a) wawancara mendalam dengan menggunakan petunjuk wawancara dan (b) pengkajian dokumen, kemudian hasilnya dianalisis dengan cara menyusun, menghubungkan, dan mereduksi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada proses perencanaan partisipatif hanya pada tahap penyelidikan, perumusan masalah, identifikasi daya dukung dan perumusan tujuan, yang sudah melibatkan masyarakat, sedangkan masyarakat tidak disertakan pada tahap

menetapkan langkah-langkah rinci dan perancangan anggaran. Tingkat penyerapan partisipasi masyarakat pada APBD Kabupaten Lombok Utara tahun 2009-2013 adalah sangat baik. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa dari belanja langsung lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), tingkat serapan anggaran rata-rata dalam lima tahun adalah sebesar 50,36 persen untuk membiayai program/kegiatan berdasarkan usulan masyarakat melalui Musrenbang. Faktor yang memengaruhi tingkat penyerapan partisipasi tersebut adalah (1) ketersediaan anggaran, (2) kepentingan politik, (3) kualitas usulan, dan (4) tingkat kepentingan (urgensi).

Tulisan kelima berjudul “Evaluasi Program Penanggulangan Kemiskinan dengan Menggunakan Metode *Rappoverty*” yang ditulis oleh Nafiah Ariyani dan Akhmad Fauzi. Mereka menganalisis program penanggulangan kemiskinan dengan pendekatan baru melalui teknik *Rappoverty*. Teknik ini dilakukan berdasarkan skala multi-dimensi dan teknik utilitas multi atribut. Pendekatan ini tidak hanya melibatkan aspek multidimensi kriteria pengentasan kemiskinan, tetapi juga menetapkan faktor *leverage* program pengentasan kemiskinan. Data untuk analisis diperoleh melalui survei, wawancara dengan pemerhati kemiskinan, pengelola, dan penerima program penanggulangan kemiskinan, serta observasi terhadap data-data kemiskinan dan sumber-sumber lain. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perbedaan antarprogram, ketepatan program dengan kebutuhan masyarakat sasaran, keakuratan data calon penerima program, biaya manajemen, mekanisme penentuan target, kepraktisan organisasi, koordinasi antarlembaga, keberadaan lembaga-lembaga publik serta jumlah penerima manfaat program adalah beberapa faktor yang berfungsi sebagai *leverage* keberlanjutan program penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan berbasis zakat adalah program dengan status keberlanjutan yang terbaik.

Tulisan keenam yang ditulis oleh Achmad Sani Alhusain berjudul “Kendala dan Upaya Pengembangan Industri Batik di Surakarta Menuju Standardisasi”. Penulis mengangkat kebijakan standardisasi sebagai salah satu strategi untuk dapat meningkatkan kualitas dan daya saing industri batik, khususnya di Kota Solo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui (a) wawancara mendalam dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha industri serta (b) *focus group discussion* dengan akademisi universitas di daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha Batik Surakarta berusaha sendiri untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produk batiknya. Pelaku usaha Batik Surakarta, khususnya industri kecil dan menengah, menghadapi kendala untuk memenuhi standar kualitas nasional (SNI), terutama persyaratan izin usaha dan biaya untuk memperoleh SNI. Hingga saat ini pemerintah, khususnya pemerintah daerah, belum memiliki infrastruktur yang memadai, terutama laboratorium pengujian, untuk memverifikasi pengajuan SNI secara suka rela. Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta untuk meningkatkan kualitas produk unggulan daerahnya agar dapat memenuhi SNI dilakukan dengan program peningkatan kapasitas industri dan sumber daya manusia.

Tulisan ketujuh berjudul “Pengendalian Negara atas BUMN Sektor Telekomunikasi Pascaprivatisasi” yang ditulis oleh Sahat Aditua F. S. Penulis mengkaji keberadaan dan peran strategis BUMN Telekomunikasi. Perdebatan yang sering muncul apakah pemerintah harus mempertahankan kepemilikan dominan di BUMN Telekomunikasi dalam rangka melindungi kepentingan negara ataukah pemerintah dapat memberikan kepemilikan saham bagi pihak swasta dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja perusahaan, baik sebelum maupun setelah rezim privatisasi. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder yang berasal dari jurnal, literatur, media daring, maupun sumber resmi lainnya. Kajian ini menemukan bahwa kebijakan, baik sebelum maupun setelah rezim privatisasi, ternyata dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehingga kebijakan privatisasi dapat dibenarkan. Kajian ini juga menyarankan tiga instrumen untuk mempertahankan kendali negara atas BUMN Telekomunikasi, yaitu penerbitan saham emas, pembentukan badan pengatur independen, dan pemberian lisensi bagi operator telekomunikasi swasta.

Harapan kami semoga tulisan-tulisan tersebut dapat memberikan manfaat dan menambah khasanah keilmuan bagi pemangku kepentingan, khususnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya. Ucapan terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada Mitra Bestari dan Redaksi Pelaksana yang berperan aktif dalam memberikan masukan dan perbaikan, baik berupa substansi maupun redaksional. Ucapan terima kasih tak lupa disampaikan kepada seluruh jajaran sekretariat dan tata usaha yang telah mendukung suksesnya penerbitan jurnal untuk edisi bulan Desember 2015.

Jakarta, 20 Desember 2015

Hormat kami,
Dewan Redaksi Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 6, NO. 2, DESEMBER 2015

ISSN: 2086-6313

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh difotokopi.

Rasbin (P3DI Setjen DPR-RI)

PENGARUH VARIABEL-VARIABEL FUNDAMENTAL MAKROEKONOMI, NONEKONOMI, DAN NEWS (BERITA) TERHADAP PERGERAKAN NILAI TUKAR RUPIAH PERIODE 2004-2014

JEKP, Vol. 6, No. 2, Desember 2015, hal. 123-134

Abstrak

Sejak penerapan sistem rezim nilai tukar mengambang bebas, nilai tukar dipengaruhi oleh banyak faktor baik internal maupun eksternal, yang meliputi variabel-variabel fundamental makroekonomi, nonekonomi, maupun *news*. Tujuan utama dari tulisan ini adalah untuk meneliti dan menganalisis pengaruh variabel-variabel fundamental makroekonomi, nonekonomi, dan *news* terhadap pergerakan nilai tukar rupiah per dolar AS. Tulisan ini menggunakan data bulanan dari Januari 2004 sampai dengan November 2014. Sumber data untuk tulisan ini diperoleh dari *International Financial Statistic (IFS)*, web Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan studi Prasetyo (2014). Untuk mencapai tujuan tersebut, tulisan ini menggunakan metode estimasi *Threshold Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (TARCH)*. Hasil estimasi dalam tulisan ini menunjukkan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada periode tahun 2004-2014 dipengaruhi secara signifikan oleh variabel-variabel fundamental makroekonomi seperti nilai tukar periode sebelumnya dan perbedaan tingkat suku bunga bank sentral dalam negeri dan luar negeri di mana masing-masing bertanda positif dan negatif. Faktor-faktor nonekonomi yang memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah secara signifikan adalah waktu pelaksanaan pemilu dengan tanda koefisien adalah negatif. Selain faktor-faktor fundamental makroekonomi dan nonekonomi, pergerakan nilai tukar rupiah juga dipengaruhi oleh variabel *news*. Variabel *news* yang memengaruhi pergerakan nilai tukar secara signifikan adalah *news* tentang pertumbuhan jumlah uang beredar dan *news* tentang tingkat harga. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS bersifat asimetris.

Kata kunci: nilai tukar, fundamental makroekonomi, nonekonomi, berita

Joko Tri Haryanto (BKF, Kementerian Keuangan) dan Budhi Purwandaya (Universitas Trilogi)

**KAJIAN EVALUASI DAMPAK PENGHAPUSAN KEBIJAKAN “HOLD HARMLESS”
DALAM ALOKASI DAU: PENDEKATAN MODEL SYSTEM DYNAMICS**

JEKP, Vol. 6, No. 2, Desember 2015, hal. 135-145

Abstrak

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah telah mengubah Indonesia dari negara terpusat menjadi negara yang terdesentralisasi. Adapun implikasi langsung dari kebijakan ini adalah kebutuhan dana untuk membiayai pelaksanaan fungsi yang telah menjadi kewenangan daerah. Untuk membantu daerah dalam mendanai berbagai urusan dan yang telah didelegasikan kewenangan, pemerintah pusat menerapkan prinsip transfer ke daerah sesuai dengan kewenangan dan fungsi termasuk alokasi Dana Alokasi Umum (DAU). Dalam kebijakan DAU, pemerintah kemudian melakukan kebijakan *hold harmless*, di mana alokasi DAU tidak akan berkurang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Kebijakan itu kemudian dianggap negatif bagi proses perhitungan formula DAU. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi penghapusan kebijakan *hold harmless* sejak tahun 2008. Dengan menggunakan *system dynamics*, secara umum penghapusan kebijakan *hold harmless* akan memberikan kinerja pemerataan fiskal yang lebih baik. Namun demikian, kriteria pemilihan atau penetapan penyetaraan fiskal antardaerah perlu dibuat lebih objektif sesuai dengan tujuan awal alokasi DAU untuk menghindari kesalahan dalam menilai persepsi ekuitas antardaerah. Penelitian ini memberikan rekomendasi bahwa dengan mempertimbangkan pemerataan fiskal yang lebih baik, pelaksanaan penghapusan kebijakan *hold harmless* perlu dipertahankan. Penghapusan kebijakan ini juga pembelajaran untuk semua pemangku kepentingan untuk lebih berpikiran nasional (tidak hanya peduli dengan daerah masing-masing), serta upaya untuk meningkatkan kemandirian daerah, terutama daerah dengan kapasitas fiskal potensi tinggi.

Kata kunci: *hold harmless*, *system dynamics*, DAU, kapasitas fiskal, transfer ke daerah, kewenangan daerah

Ariesy Tri Mauleny (P3DI Setjen DPR-RI)

AGLOMERASI, PERUBAHAN SOSIAL EKONOMI DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JAKARTA

JEKP, Vol. 6, No. 2, Desember 2015, hal. 147-162

Abstrak

Perpaduan pembangunan Jakarta dan daerah sekitarnya secara alami berawal dari aglomerasi yang didorong oleh konsentrasi spasial dari aktivitas ekonomi yang meliputi aspek ruang, tingkat komunitas, skala kota, dan kawasan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan keterkaitan antara aglomerasi, pertumbuhan, dan perubahan sosial ekonomi yang terjadi di Jakarta. Pendekatan yang digunakan adalah metode estimasi regresi data panel *fixed effect* menggunakan data kota/kabupaten administrasi di Jakarta tahun 2008-2013. Hasil penelitian menunjukkan aglomerasi produksi berpengaruh nyata dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi namun negatif terhadap tingkat kemiskinan dan IPM. Sementara aglomerasi penduduk berpengaruh nyata dan negatif bagi pertumbuhan dan tingkat kemiskinan namun positif terhadap IPM. Kota/kabupaten yang memiliki tanda *fixed effect cross* positif terhadap perkembangan sosial ekonomi adalah Jaksel, Jaktim, Jakpus, dan Jakbar, sementara Jakut dan Kepulauan Seribu menunjukkan tanda negatif. Rancangan kawasan megapolitan Jabodetabekjur diharapkan menjadi solusi bagi permasalahan Jakarta seperti banjir, kemacetan dan sampah, serta permasalahan tata ruang lainnya. Mempercepat koordinasi untuk penanganan isu-isu strategis daerah yang dapat meningkatkan kinerja perekonomian secara keseluruhan dan memperluas dampak pemerataan pembangunan, harus segera dilakukan. Pengembangan sistem transportasi yang menunjang aktivitas ekonomi, sosial, dan budaya, perbaikan kualitas jalan, pengembangan angkutan umum massal, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam pengendalian urbanisasi dan pengelolaan tata ruang dan wilayah, menjadi alternatif solusi yang dapat dilakukan.

Kata kunci: aglomerasi, sosial ekonomi, pembangunan, Jakarta

Masjudin Ashari (Universitas Mataram), Wahyunadi (Universitas Mataram), dan Hailudin (Universitas Mataram)

ANALISIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN LOMBOK UTARA (STUDI KASUS PERENCANAAN PARTISIPATIF TAHUN 2009-2013)

JEKP, Vol. 6, No. 2, Desember 2015, hal. 163-180

Abstrak

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu daerah sebab APBD menggambarkan prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat. Untuk itu, kepentingan rakyat harus menjadi prioritas utama dalam penganggarannya sesuai kondisi problematika daerahnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis proses perencanaan partisipatif dan bagaimana penyerapan partisipasi masyarakat pada APBD Kabupaten Lombok Utara tahun 2009-2013 serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penyerapan partisipasi masyarakat tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan paradigma interpretatif dengan pendekatan fenomenologi, sedangkan data dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses partisipatif yang melibatkan masyarakat hanya terjadi pada tahap penyelidikan, perumusan masalah, identifikasi daya dukung, dan perumusan tujuan, tidak pada tahap penetapan langkah-langkah rinci dan perancangan anggaran. Tingkat penyerapan partisipasi masyarakat pada APBD Kabupaten Lombok Utara tahun 2009-2013 adalah sangat baik dengan tingkat serapan anggaran rata-rata dalam 5 tahun terhadap belanja langsung 5 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah sebesar 50,36 persen. Faktor yang memengaruhi tingkat penyerapan partisipasi tersebut adalah (1) ketersediaan anggaran, (2) kepentingan politik, (3) kualitas usulan, dan (4) tingkat kepentingan (urgensi).

Kata kunci: perencanaan partisipatif, penyerapan partisipasi masyarakat, APBD

Nafiah Ariyani (Institut Pertanian Bogor), Akhmad Fauzi (Institut Pertanian Bogor),
Bambang Juanda (Institut Pertanian Bogor), dan Irfan Syauqi Beik (Institut Pertanian Bogor)

EVALUASI PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN MENGGUNAKAN METODE *RAPPOVERTY*

JEKP, Vol. 6, No. 2, Desember 2015, hal. 181-197

Abstrak

Meskipun berbagai metode untuk menilai kinerja program pengentasan kemiskinan telah diterapkan, namun sebagian besar penilaian yang ada umumnya bersifat kualitatif, mendasarkan penilaian pada kriteria tunggal, dan berfokus pada program tertentu atau di daerah tertentu saja. Mengingat program pengentasan kemiskinan meliputi banyak dimensi dan kriteria guna menghadapi kemiskinan yang multidimensional, maka menggunakan penilaian tunggal akan menghambat efektivitas evaluasi program itu sendiri. Penelitian ini mengusulkan pendekatan baru dalam mengevaluasi program pengentasan kemiskinan dengan menggunakan teknik *Rappoverty* berdasarkan skala multi-dimensi (MDS) dan teknik utilitas multi atribut (MAUT). Pendekatan ini tidak hanya berkaitan dengan aspek multidimensi kriteria pengentasan kemiskinan, tetapi juga menetapkan faktor penguangkit program pengentasan kemiskinan. Kriteria dan data untuk analisis diperoleh melalui metode *world cafe*, wawancara dengan pemerhati kemiskinan, pengelola, dan penerima program, serta observasi terhadap data-data kemiskinan dan sumber-sumber lain. Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor perbedaan antarprogram, ketepatan program dengan kebutuhan masyarakat sasaran, keakuratan data calon penerima program, biaya manajemen, mekanisme penentuan target, kepraktisan organisasi, koordinasi antarlembaga, keberadaan lembaga-lembaga publik serta jumlah penerima manfaat program adalah faktor-faktor yang berperan sebagai penguangkit status keberlanjutan program pengentasan kemiskinan. Artinya jika di antara salah satu faktor-faktor ini dihilangkan, maka akan berdampak pada status keberlanjutan program. Penelitian ini juga menunjukkan hasil evaluasi terhadap status keberlanjutan program pengentasan kemiskinan dan menyatakan bahwa program-program berbasis zakat adalah program dengan status keberlanjutan terbaik.

Kata kunci: program pengentasan kemiskinan, *Rappoverty*, status keberlanjutan, faktor penguangkit

Achmad Sani Alhusain (P3DI Setjen DPR-RI)

KENDALA DAN UPAYA PENGEMBANGAN INDUSTRI BATIK DI SURAKARTA MENUJU STANDARDISASI

JEKP, Vol. 6, No. 2, Desember 2015, hal. 199-213

Abstrak

Gencarnya produk batik impor yang masuk ke Indonesia merupakan tantangan bagi industri Batik Surakarta untuk dapat bersaing. Dalam hal ini standardisasi merupakan salah satu strategi untuk dapat meningkatkan kualitas dan daya saing. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaku usaha di Surakarta menjaga kualitas produk batik dan mengidentifikasi upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendorong pelaku usaha agar dapat memenuhi standar sehingga dapat meningkatkan daya saing batik Surakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pemerintah daerah dan pelaku usaha industri. Hasil penelitian ini menunjukkan sebagian besar pelaku usaha Batik Surakarta berusaha sendiri untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produk batiknya. Pelaku usaha Batik Surakarta khususnya industri kecil dan menengah menghadapi kendala untuk memenuhi standar kualitas nasional (SNI) terutama memenuhi persyaratan izin usaha dan biaya untuk memperoleh SNI. Sangat disayangkan bahwa sampai saat ini pemerintah, khususnya pemerintah daerah, masih belum memiliki infrastruktur yang cukup terutama laboratorium pengujian untuk memverifikasi pengajuan SNI sukarela. Pemerintah Kota Surakarta telah berusaha meningkatkan kualitas produk unggulan daerahnya agar dapat memenuhi SNI melalui program peningkatan kapasitas industri dan sumber daya manusia.

Kata kunci: batik, standar kualitas, daya saing, pemerintah daerah

Sahat Aditua F. S. (P3DI Setjen DPR-RI)

PENGENDALIAN NEGARA ATAS BUMN SEKTOR TELEKOMUNIKASI PASCAPRIVATISASI

JEKP, Vol. 6, No. 2, Desember 2015, hal. 215-226

Abstrak

Pemerintah harus melindungi keberadaan perusahaan negara telekomunikasi karena sektor telekomunikasi memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara dan memiliki nilai strategis. Karena alasan inilah, maka terjadi debat seputar masalah privatisasi BUMN telekomunikasi. Perdebatan yang sering muncul apakah pemerintah harus mempertahankan kepemilikan dominan di BUMN telekomunikasi dalam rangka melindungi kepentingan negara, ataukah pemerintah dapat memberikan kepemilikan saham bagi pihak swasta dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji kinerja perusahaan baik sebelum maupun setelah rezim privatisasi. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sumber data sekunder yang berasal dari jurnal, literatur, media daring, maupun sumber resmi lainnya. Kajian ini menemukan bahwa kebijakan baik sebelum maupun setelah rezim privatisasi ternyata dapat meningkatkan kinerja perusahaan sehingga kebijakan privatisasi dapat dibenarkan. Kajian ini juga menyarankan tiga instrumen untuk mempertahankan kendali negara atas BUMN telekomunikasi, yaitu penerbitan saham emas, pembentukan badan pengatur independen, dan pemberian lisensi bagi operator telekomunikasi swasta.

Kata kunci: Badan Usaha Milik Negara, telekomunikasi, privatisasi, pemerintah

Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik

Mensinergikan Kebijakan dan Pemberdayaan Ekonomi

VOL. 6, NO. 2, DECEMBER 2015

ISSN: 2086-6313

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in a writing. These abstracts are allowed to copy without permission from the publisher and free of charge.

Rasbin (P3DI Setjen DPR-RI)

**THE INFLUENCE OF MACROECONOMIC FUNDAMENTAL,
NON ECONOMIC, AND NEWS VARIABLES TOWARDS MOVEMENT OF
EXCHANGE RATE DURING 2004-2014**

JEKP, Vol. 6 No. 2, December 2015, pp. 123-134

Abstract

After applying the free floating exchange rate regime system, the exchange rate is determined by many factors both internally and externally, and both macroeconomic fundamental and non economic variables and the news. The main purpose of this research is to investigate and analyze the influence of macroeconomic fundamental and non economic variables and news to exchange rate movement (Rp/USD). This research used time series monthly data from January 2004 until November 2014. The data source for this research is taken from International Financial Statistics (IFS), web of Komisi Pemilihan Umum (KPU), and work of Prasetyo (2014). To reach the goals, this study used Threshold Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (TARCH) model. Based on TARCH, movement of exchange rate (Rp/USD) was influenced significantly by macroeconomic fundamental variables such as lagged exchange rate and differences of interest rate with positive and negative sign, respectively. Movement exchange rate was affected significantly by non economic variable such as time of the election with negative sign. Beside macroeconomic fundamental and non economic variables, movement of exchange rate was influenced significantly by news too such as news about growth of the money supply and price level. This study also shows that the movement of the rupiah against the US dollar is assymetric.

Keywords: exchange rate, macroeconomic fundamental, non economic, news

Joko Tri Haryanto (BKF, Ministry of Finance) and Budhi Purwandaya (Trilogi University)

**STUDY ON THE ELIMINATION OF IMPACT EVALUATION “HOLD HARMLESS” POLICY
IN DAU ALLOCATION: SYSTEM DYNAMICS MODEL APPROACH**

JEKP, Vol. 6, No. 2, December 2015, pp. 135-145

Abstract

The implementation of the regional autonomy policy has transformed Indonesia from centralized into decentralized state. The immediate implication of this policy is the need of funds to finance the implementation of a function that has become the regional authority. To help finance various programs and those which have been given to the regions authority, the central government has applied transfer principle to the regions in accordance with their authority and functions including General Allocation Funds (DAU) allocation. In DAU policy, the government applies hold harmless policy, where the DAU allocation will not be reduced compared to previous years. The policy is then considered to be negative for the DAU formula calculation. This study is conducted to evaluate the elimination of hold harmless policy that has been adopted since 2008. By using system dynamics, in general, the elimination of hold harmless policy will provide a better equal fiscal performance. However, the selection criteria or the determination of fiscal equalization among regions need to be made more objective, in accordance with the original purpose of DAU allocation to avoid mistakes in assessing the perception of equity among regions. This study recommends that by considering a better fiscal equalization, the elimination of hold harmless policy should be maintained. The elimination is also becomes a lesson to all stakeholders to be more national minded (in contrast to regional minded way of thinking which concerns only over each region), as well as efforts to increase the independence of the regions, particularly regions with high potential of fiscal capacity.

Keywords: hold harmless, system dynamics, general allocation funds (DAU), fiscal capacity, transfer to regions, regional authority

Ariesy Tri Mauleny (P3DI Setjen DPR-RI)

AGGLOMERATION, SOCIO-ECONOMIC CHANGES AND DEVELOPMENT POLICY OF JAKARTA

JEKP, Vol. 6, No. 2, December 2015, pp. 147-162

Abstract

The fusion of development between Jakarta and its surrounding areas naturally starts from agglomeration which is boosted by spatial concentration from economic activities covering aspects of spatial zoning, community level, and scales of city and region. This research is aimed to find out the progress and correlation between agglomeration, growth, and socio-economic changes that occur in Jakarta. The approach used is fixed effect panel data regression estimation method using data from city/regency administration in Jakarta from 2008-2013. The result shows that production agglomeration has significant and positive impact on economic growth but negative on poverty rate and Human Development Index (HDI). On the other hand, population agglomeration has significant and negative impact on economic growth and poverty rate but positive on HDI. Cities/regencies that have positive fixed effect cross signs towards socio-economic development are South, East, Central, and West Jakarta, meanwhile North Jakarta and Kepulauan Seribu regency show negative sign. The concept of “Megapolitan” area (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, and Cianjur) is expected to become solution to the problem faced by Jakarta such as flooding, congestion, waste, and other spatial issues. Accelerate coordination to handle regional strategic issues which can improve economic performance overall and expand the impact of equitable development that must be done. Development of transportation system to support economic, social, and cultural activities, improvement of quality of road, development of mass transportation, and enhancement the capacity of local government in order to management of urbanization and control spatial and regions, may become alternative solutions that can be done.

Keywords: agglomeration, socio-economic, development, Jakarta

Masjudin Ashari (University of Mataram), Wahyunadi (University of Mataram), and Hailudin (University of Mataram)

**AN ANALYSIS OF REGIONAL DEVELOPMENT PLANNING IN NORTH LOMBOK REGENCY:
A CASE STUDY OF PARTICIPATORY PLANNING FROM 2009-2013**

JEKP, Vol. 6, No. 2, December 2015, pp. 163-180

Abstract

The Regional Budget (APBD) is one of the indicators for the success of development in a region as it illustrates the priorities and guidelines of government policy in current budget year that is intended for the welfare of the people. The interests of the people must be the main priority and budgeting should be in line with the problematic condition in a region. This research is aimed to analyse people's participatory planning process and participation rate in the North Lombok's Regional Budget in the period of 2009-2013 and factors contributing to the rate of people's participation. This is a qualitative research, using interpretative paradigm with a phenomenological approach and the data are collected through in-depth interviews. The results show that on the planning process, participation only on the stage of investigation, formulating the problem, identification of the carrying capacity and the formulating of the purpose, on this stage the community already involved but on the stage of establish detail measurement and designing the budget the community is not involved at all. Results of research indicate that the absorption level of the participation of the community in North Lombok District year 2009-2013 is primly good with the absorption level of the budget on direct expenditure from 5 Unit of Work Area (SKPD) which have a community participations about 50,36 percent. Factors that affect absorption level of the community participation are (1) availability of a limited budget, (2) political, (3) quality of the proposals, and (4) level of interest (urgency).

Keywords: participatory planning, absorbing participation of society, regional budget

Nafiah Ariyani (Bogor Agricultural University), Akhmad Fauzi (Bogor Agricultural University), Bambang Juanda (Bogor Agricultural University), and Irfan Syauqi Beik (Bogor Agricultural University)

EVALUATION OF POVERTY ALLEVIATION PROGRAMS USING THE RAPPOVERTY METHOD

JEKP, Vol. 6, No. 2, December 2015, pp. 181-197

Abstract

Although various methods of evaluating poverty alleviation program have been applied, most of them are qualitative in nature, basing its assessment only on a single criterion and focusing on a particular program and region. Considering the multi-dimensional and multi-criteria nature of poverty alleviation program, the use of a single evaluation method will only hamper its effectiveness. This research proposes a new approach to evaluating poverty alleviation program by using the Rappoverty technique based on Multidimensional Scaling (MDS) and Multi-Attribute Utility Theory (MAUT). This approach is not merely related to the multi-dimensional and multi-criteria aspects of poverty alleviation program. It also has something to do with determining the leverage factor of the program. The data for analysis are obtained through survey, interviews with poverty analysts, managers, and beneficiaries of poverty alleviation program, as well as observation of poverty data and other sources. Findings of the research suggest that differences of programs, suitability of programs to the needs of targeted communities, accuracy of the data of potential beneficiaries, management cost, target identification mechanisms, organization's practicality, cross-institution coordination, the presence of public institutions, and number of beneficiaries are some of the factors that serve as leverage to the sustainability of a poverty alleviation program. The research also shows that zakat (alms giving)-based poverty alleviation programs are programs with the best sustainability status.

Keywords: poverty alleviation program, Rappoverty, sustainability status, leverage factors

Achmad Sani Alhusain (P3DI Setjen DPR-RI)

EFFORTS AND OBSTACLES IN THE DEVELOPMENT OF BATIK INDUSTRY IN SURAKARTA TOWARDS STANDARDIZATION

JEKP, Vol. 6, No. 2, December 2015, pp. 199-213

Abstract

The aggressive flow of imported Batik to Indonesia creates a big challenge for local producers to become more competitive. Thus, standardization becomes one of the strategies to improve quality and competitiveness. This study is aimed at figuring out how local batik makers in Surakarta maintain the good quality of their batik and identifying efforts that can be made by Surakarta local government to boost local businesses in order to meet quality standards that will eventually improve the competitiveness of Batik. This study employs qualitative method carried out through in-depth interviews with the local government, local entrepreneurs, as well as focus group discussion with academics from local universities. The study reveals that the majority of Surakarta Batik makers are on their feet when it comes to maintaining and improving the quality of their Batik products. Surakarta Batik makers, particularly small and medium enterprises, are facing problems in meeting the Indonesian National Standard (SNI), especially with regard to meeting the business permit requirements and costs to get SNI certification. It is unfortunate that, even until today, the government especially local governments are still yet to provide adequate infrastructures, particularly testing laboratories to verify voluntary submission for SNI certification. Surakarta municipality administration has made some efforts to improve the quality of local flagship products and made them SNI certified through capacity building programs for both the industry and the human resources.

Keywords: batik, standard quality, competitiveness, local government

Sahat Aditua F. S. (P3DI Setjen DPR-RI)

GOVERNMENT'S CONTROL OVER STATE-OWNED TELECOMMUNICATION ENTERPRISES IN THEIR POST-PRIVATIZATION

JEKP, Vol. 6, No. 2, December 2015, pp. 215-226

Abstract

Government must protect state-owned telecommunication enterprises since they have vital and strategic roles in maintaining the sovereignty of our country. The recurring debate is whether the government should maintain its majority ownership of state-owned telecommunication enterprises to protect national interests, or if the government should share its ownership with the private sector to improve its performance. The aim of this study is to analyze the companies performance pre-privatization and post-privatization's regime. The research method employed for this study is descriptive-qualitative in nature with secondary sources of data collected from journals, literatures, online media, and other official sources. The study concludes that the policies adopted pre-privatization and post-privatization's substantially improves the companies performance, therefore the adoption of privatization can be justified. The study also proposes three instruments to maintain state control over state-owned telecommunication enterprises, namely: issuance of gold shares, establishment of an independent regulatory agency, and issuance of licence for operator of private telecommunication enterprises.

Keywords: state-owned enterprise, telecommunication, privatization, government